

Analisis Kemampuan dan Kemauan Membayar Iuran Jkn Pada Peserta PBPU Pedagang Pasar Sentral Kabupaten Bone

Analysis Of Ability And Willingness To Pay Jkn Contributions For PBPU Participants Of Central Market Traders In Bone Regency

Aisyah Maulida Putri^{1*}, Darmawansyah¹

¹Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin

*Korespondensi:

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10, Makassar 90245, Indonesia, Telp: 0859-4583-8506,

Email: aisyahmaulidaputri11@gmail.com

Abstract

Background: Non-Wage Recipient Participants (PBPU) are one of the participants of the Social Security Administering Body (BPJS) who must pay monthly contributions with a certain amount according to the desired class of care. Currently, the number of Non-Wage Recipient Participants of BPJS Kesehatan Bone Regency who have arrears is 41,860 people or around 90.6% of participants in arrears in the past year. Ability to pay and Willingness to pay are two factors that play a role in the utilization of medical services which will then affect equity. **Aims:** To analyze the ability and willingness to pay National Health Insurance Contributions for PBPU Participants in the Informal Sector of Central Market Traders in Bone Regency. **Method:** Quantitative research with a descriptive analysis approach. The number of samples is 100 market traders who are non-wage participants. **Results:** The ability to pay of ATP 1 respondents in the poor category is 69% with an average of Rp. 699,825, for ATP 2 non-food is in the category of unable, namely 73% with an average ATP of Rp. 31,105 and for ATP 2 non-essential is in the category of unable, namely 66% with an average ATP of Rp. 17,275. While the willingness to pay the contribution of respondents is in the category of willing, namely 77% or as many as 77 respondents. Respondents' knowledge about JKN is in the good category, namely 57% or 57 respondents. **Conclusion:** Based on the relationship between ATP and WTP, it shows that the largest category is unable to pay JKN contributions but has a high willingness to pay. Thus, it is hoped that the community can reduce or stop non-essential spending in the form of cigarettes, snacks and parties so that the ability to pay for JKN contributions is greater.

Keywords: Merchant; Ability; Willingness; Pay; Contribution;

Abstrak

Latar Belakang: Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) merupakan salah satu kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang harus membayar iuran setiap bulannya dengan besaran tertentu sesuai dengan kelas perawatan yang inginkan. Saat ini tercatat jumlah Peserta Bukan Penerima Upah BPJS Kesehatan Kabupaten Bone yang memiliki tunggakan sebanyak 41.860 jiwa atau sekitar 90,6% peserta menunggak dalam satu tahun terakhir. Kemampuan membayar dan Kemauan membayar adalah dua faktor yang berperan dalam utilisasi pelayanan medis yang selanjutnya akan mempengaruhi pemerataan. **Tujuan:** Untuk menganalisis kemampuan dan kemauan Membayar Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Pada Peserta PBPU Sektor Informal Pedagang Pasar Sentral Kabupaten Bone. **Metode:** Penelitian Kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Jumlah sampel sebanyak 100 pedagang pasar yang merupakan peserta bukan penerima upah. **Hasil:**

Kemampuan membayar responden ATP 1 pada kategori tidak mampu yaitu 69% dengan rata-rata sebesar Rp. 699.825, untuk ATP 2 non makanan berada pada kategori tidak mampu yaitu 73% dengan rata-rata ATP sebesar Rp.31.105 dan untuk ATP 2 non essensial berada pada kategori tidak mampu yaitu 66% dengan rata-rata ATP sebesar Rp.17.275. Sedangkan kemauan membayar iuran responden berada pada kategori mau yaitu 77% atau sebanyak 77 responden. Pengetahuan responden mengenai JKN berada dikategori baik yakni 57% atau 57 responden. **Kesimpulan:** Berdasarkan hubungan ATP dan WTP menunjukkan kategori terbanyak tidak mampu membayar iuran JKN namun memiliki kemauan membayar tinggi. Sehingga, diharapkan masyarakat dapat mengurangi atau menghentikan pengeluaran non essensial berupa rokok, jajan dan pesta agar kemampuan membayar untuk iuran JKN semakin besar.

Kata Kunci: Pedagang; Kemampuan; Kemauan; Membayar; Iuran;

PENDAHULUAN

Peserta Bukan Penerima Upah (PBP) adalah pekerja yang bekerja secara mandiri atau tidak menerima upah dari pemberi kerja seperti pedagang, petani dan pekerja bukan penerima upah lainnya (Iqbal dkk., 2023). Kepesertaan PBP merupakan salah satu kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang harus membayar iuran setiap bulannya dengan besaran tertentu sesuai dengan kelas perawatan yang inginkan. Hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang kesulitan untuk melakukan pembayaran iuran setiap bulannya (B. A. Hidayanti, 2020). Namun, di lain sisi BPJS Kesehatan dapat menjadi jaminan kesehatan yang tepat bagi pekerja yang berpenghasilan tidak tetap agar dapat merasakan pelayanan kesehatan yang cukup memadai dan dapat mengurangi risiko masyarakat dalam menanggung biaya kesehatan dari kantong mereka sendiri (*out of pocket*) dalam jumlah yang sangat besar dan sulit diprediksi (Hidayanti et al., 2021).

Data kepesertaan BPJS Kesehatan pada akhir tahun 2022 menunjukkan terdapat 2.407.300 juta jiwa peserta dengan proporsi peserta laki-laki lebih tinggi (51,19%) dibandingkan perempuan (48,81%). Jika berdasarkan segmentasi peserta menunjukkan kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBP) sebanyak 286.956 jiwa. Kemudian berdasarkan kelas iuran lebih dari separuhnya adalah kelas III dengan 1.647.949 juta jiwa (BPJS Kesehatan, 2023). Menurut (Marzuki, dkk., 2019) di Kota Makassar tercatat jumlah peserta BPJS Kesehatan sebanyak 143.794 jiwa penduduk yang memiliki tunggakan iuran BPJS. Peserta Non PBI Bukan Penerima Bantuan Iuran yang memiliki tunggakan terbesar. Berdasarkan kelas kepesertaan kedua tertinggi tunggakkannya yaitu kelas 1 memiliki jumlah tunggakan 58.780 jiwa atau 25,27% Peserta Non PBI Bukan Penerima Upah.

Kemampuan membayar dan Kemauan membayar adalah dua faktor yang berperan dalam utilisasi pelayanan medis yang selanjutnya akan mempengaruhi pemerataan. Peran serta masyarakat dalam membayar iuran jaminan kesehatan akan bergantung dengan *Ability to Pay* (ATP) dan *Willingness to Pay* (WTP). Besar dan kecilnya ATP dan WTP seseorang atau masyarakat dalam pembayaran iuran tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, pendapatan, pengeluaran, informasi tentang JKN, harga/iuran, jumlah anggota keluarga, persepsi mutu pelayanan kesehatan dan riwayat katastrofik (Hidayanti et al., 2021).

Kemampuan membayar (*Ability to Pay*) merupakan kemampuan individu untuk mengeluarkan biaya atas jasa layanan kesehatan yang telah diperoleh pada fasilitas kesehatan sesuai dengan penghasilan yang dianggap ideal. Secara umum kemampuan membayar masyarakat dapat dikategorikan menjadi tiga komponen yaitu ATP belanja bukan makanan (*non food expenditure*) biasanya secara bulanan dan tahunan untuk kesehatan digolongkan dalam kelompok ini, ATP belanja bukan pokok (*non esensial expenditure*) meliputi rokok, kosmetik maupun hiburan dan terakhir ATP belanja pokok (*essential expenditure*) meliputi belanja untuk makanan, sewa dan pakaian (Taswin., dkk, 2022). Kemauan membayar (*Willingness to Pay*) merupakan kesediaan seseorang untuk membayarkan iuran pada program JKN sesuai dengan jumlah atau waktu yang telah ditentukan sebagai jaminan kesehatan untuk pekerja dengan penghasilan tidak pasti sehingga masyarakat bisa memperoleh kesehatan yang baik serta bisa meminimalkan risiko dari masyarakat yang terbebani oleh anggaran kesehatan secara pribadi dalam jumlah yang tinggi serta susah diperkirakan (Istamayu, 2022).

Kabupaten Bone adalah salah satu Daerah Otonomi di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone jumlah penduduk Kabupaten Bone Tahun 2021 adalah 801.775 jiwa yang terdiri atas 391.682 laki-laki dan 410.093 perempuan. Kabupaten Bone adalah salah satu daerah yang berada dipesisir Timur Sulawesi Selatan yang memiliki posisi strategis dalam perdagangan barang dan jasa di Kawasan Timur Indonesia. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari BPJS Kesehatan Kabupaten Bone Tahun 2024 Jumlah Peserta BPJS Kesehatan yang sudah terdaftar JKN di Kabupaten Bone sebanyak 791.489 jiwa dengan total PBI APBN sebanyak 380.725 jiwa, PBI APBD sebanyak 288.593 jiwa, PPU-PN sebanyak 61.162 jiwa, PBPU-Pekerja Mandiri sebanyak 46.162 jiwa dan PBPU-Bukan Pekerja sebanyak 14.305 jiwa.

Saat ini tercatat jumlah Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) BPJS Kesehatan Kabupaten Bone yang memiliki tunggakan dalam satu tahun terakhir sebanyak 41.860 jiwa. Berdasarkan kelas kepesertaan yang paling tinggi jumlah tunggakannya yaitu kelas 3 sebanyak 33.298 jiwa, kemudian kepesertaan tertinggi kedua tunggakannya yaitu kelas 2 dengan tunggakan sebanyak 6.046 jiwa, dan kepesertaan kelas 1 memiliki tunggakan sebanyak 2.516 jiwa. Apabila dibandingkan dengan jumlah kepesertaan PBPU Kabupaten Bone maka sekitar 90,6% peserta PBPU menunggak dalam satu tahun terakhir, sehingga dapat dikatakan sebagian besar peserta PBPU Kabupaten Bone mengalami tunggakan iuran JKN.

Salah satu pasar tradisional yang ada di Kabupaten Bone adalah Pasar Sentral Palakka yang merupakan pasar yang direlokasi dari pasar sentral lama yang disebabkan oleh terjadinya kebakaran di pasar sentral lama pada tahun 2005. Pasar Sentral Palakka terletak di Jalan MT Haryono, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kab.Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Pasar ini direlokasi pada bulan Mei tahun 2009, pada saat itu banyak pedagang yang keberatan untuk dipindahkan ke lokasi yang baru karena banyak pedagang yang khawatir dengan pendapatan mereka yang akan berubah setelah menempati pasar baru yang disediakan pemerintah. Dalam penelitian (Wahida & Abdulahanaa, 2020) Kekhawatiran beberapa pedagang

ternyata terbukti dengan sebuah kenyataan bahwa selama menempati pasar baru mereka mengalami perubahan yang signifikan terutama dari segi pendapatan.

Murti (2000) dalam (Sudarman et al., 2021) menyatakan seseorang akan memerlukan asuransi kesehatan untuk mengatasi risiko dan ketidakpastian peristiwa sakit serta implikasi biaya-biaya yang diakibatkan bagi pasien atau keluarganya. Kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional akan membantu mengurangi risiko dan beban biaya yang tidak dapat diprediksi dengan membayar sejumlah uang kepada BPJS melalui iuran yang ditentukan. Menurut (Zahara & Rayasari, 2024) pedagang pasar tradisional merupakan kelompok yang beresiko untuk mengalami Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes militus dan obesitas. Hal ini dikarenakan pedagang pasar termasuk kedalam pekerja keras dan terkadang kurang dalam menjaga kesehatan terutama pada pola istirahat.

Dengan demikian, Jaminan Kesehatan Nasional merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh semua pedagang pasar sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Syamsinar et al., 2021) pedagang pasar memiliki pendapatan rendah dikarenakan penjualan yang sedikit dan tidak besar. Dengan adanya keterbatasan ekonomi akan menyebabkan sulitnya mengakses pelayanan kesehatan, dan utilisasi pelayanan kesehatan juga menjadi rendah dengan hal ini menyebabkan tingkat kesehatan masyarakat juga rendah (Wanti, 2024). Sehingga, perlu untuk dilakukan pengukuran tentang kemampuan membayar dan kemauan membayar karena hal ini merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang dalam mengikuti Jaminan Kesehatan Nasional. Berdasarkan data dan masalah yang telah dijabarkan, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Kemampuan Membayar Dan Kemauan Membayar Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Pada Peserta PBPU Sektor Informal Pedagang Pasar Sentral di Kabupaten Bone.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini metode Penelitian Kuantitatif dengan pendekatan Analisis Deskriptif. Penelitian ini memberikan gambaran tentang Analisis Kemampuan Membayar dan Kemauan Membayar Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Pada Peserta PBPU Sektor Informal Pedagang Pasar Sentral Kabupaten Bone. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bone, dengan objek penelitian difokuskan pada kemampuan dan kemauan membayar jaminan kesehatan nasional pada pedagang pasar sentral.

Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang pasar sentral Kabupaten Bone dengan jumlah sampel sebanyak 100 pedagang pasar yang memiliki jaminan kesehatan nasional dan terdaftar sebagai peserta bukan penerima upah (PBPU). Adapun variabel yang diamati adalah pendapatan, pengeluaran, kemauan membayar normatif, kemauan membayar aktual, pengetahuan mengenai tarif, riwayat penyakit katastropik. Pengambilan data menggunakan kuesioner dengan metode wawancara. Data diolah secara statistik menggunakan aplikasi komputer statistik sehingga menghasilkan distribusi frekuensi dan persentase dari tiap variabel yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan narasi. Analisis data yang digunakan adalah univariat untuk memahami karakteristik masing-masing variabel

sehingga dapat mendeskripsikan setiap variabel kemampuan membayar dan kemauan membayar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Karakteristik responden penelitian merupakan suatu ciri khas yang melekat dan dimiliki oleh responden. Karakteristik responden meliputi jenis kelamin, umur, status pernikahan, pendidikan terakhir, dan jumlah anggota keluarga. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 100 responden.

Tabel 1. Distubusi Responden Berdasarkan Karakteristik Responden pada Peserta PBPUPedagang Pasar Sentral Kabupaten Bone Tahun 2025

Karakteristik Responden	Jumlah (n)	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	49	49.0
Perempuan	51	51.0
Umur (Tahun)		
20-29	7	7.0
30-39	19	19.0
40-49	25	25.0
50-59	39	39.0
> 60	10	10.0
Status Pernikahan		
Nikah	85	85.0
Belum Nikah	3	3.0
Berpisah	2	2.0
Duda/Janda	10	10.0
Pendidikan Terakhir		
SD (Tidak Tamat)	1	1.0
SD (Tamat)	17	17.0
SLTP/Sederajat	16	16.0
SMA/Sederajat	62	62.0
Diplomat/Akademik	1	1.0
Strata 1	3	3.0
Jumlah Anggota Keluarga		
1-3	48	48.0
4-6	46	46.0
7-9	6	6.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel 1. menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yang paling banyak adalah perempuan dengan jumlah 51 responden (51%). Karakteristik responden berdasarkan kelompok umur yang paling banyak berada pada umur 50-59 dengan 39 responden (39%). Berdasarkan status pernikahan yang paling banyak adalah nikah dengan 85 responden (85%). Berdasarkan pendidikan terakhir yang paling banyak berada pada tingkat pendidikan terakhir SMU/Sederajat dengan 62 responden (62%). Berdasarkan jumlah anggota keluarga yang paling banyak berada pada 1-3 jumlah anggota keluarga dengan 48 responden (48%).

Tabel 2 Distribusi responden berdasarkan Pendapatan dan Pengeluaran pada Peserta PBPU Pedagang Pasar Sentral Kabupaten Bone Tahun 2025

Variabel (Pendapatan dan Pengeluaran) (Rp)	Responden	
	Jumlah (n)	Persentase (%)
Pendapatan		
< 1.499.999	4	4.0
1.500.000 - 1.999.999	5	5.0
2.000.000 - 2.499.999	5	5.0
2.500.000 - 2.999.999	20	20.0
> 3.000.000	66	66.0
Pengeluaran Makanan		
< 1.500.000	72	72.0
≥ 1.500.000	28	28.0
Pengeluaran Non Makanan		
< 1.000.000	76	76.0
≥ 1.000.000	24	24.0
Pengeluaran Non Essensial		
< 500.000	69	69.0
≥ 500.000	31	31.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa bahwa pendapatan keluarga per bulan yang paling banyak pada kelompok > Rp. 3.000.000 dengan 66 responden (66%). Pengeluaran makanan responden per bulan paling banyak berada pada kategori < 1.500.000 dengan 72 responden (72%). Pengeluaran non makanan responden paling banyak berada pada kategori < 1.000.000 dengan 76 responden (76%). Pengeluaran non esensial responden paling banyak berada pada kategori < 500.000 dengan 69 responden (69%).

Tabel 3. Distribusi responden berdasarkan ATP 1 dan ATP 2 pada Peserta PBPU Pedagang Pasar Sentral Kabupaten Bone Tahun 2025

ATP 1 dan ATP 2	Responden	
	Jumlah	Persentase (%)
ATP 1		
Tidak Mampu	61	61.0
Mampu	39	39.0
ATP 2 Non Makanan		
Tidak Mampu	73	73.0
Mampu	27	27.0
ATP 2 Non Essensial		
Tidak Mampu	66	66.0
Mampu	34	34.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa perhitungan kemampuan membayar responden dengan menggunakan rumus ATP 1 terbanyak dalam kategori tidak mampu dengan 61 responden (61%). Kemampuan membayar responden dengan menggunakan rumus ATP 2 untuk non makanan terbanyak ada pada kategori tidak mampu dengan 73 responden (73%) dan ATP 2 non esensial terbanyak pada kategori tidak mampu sebanyak 66 responden (66%).

Tabel 4. Distribusi responden berdasarkan variabel WTP (normatif dan aktual) pengetahuan mengenai JKN pada Peserta PBPU Pedagang Pasar Sentral Kabupaten Bone Tahun 2025

Variabel WTP (normatif dan aktual), pengetahuan	Responden	
	Jumlah	Persentase (%)
Kemauan membayar normatif		
Non Kelas JKN	11	11.0
Kelas 3	63	63.0
Kelas 2	14	14.0
Kelas 1	12	12.0
Kemauan membayar aktual		
Kelas 3	95	95.0
Kelas 2	4	4.0
Kelas 1	1	1.0
Kemauan membayar tunggakan iuran		
Mau	77	77.0
Tidak Mau	23	23.0
Pengetahuan mengenai iuran JKN		
Baik	57	57.0
Kurang	43	43.0
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer, 2025

Tabel 4 menunjukkan bahwa kemauan membayar normatif terbanyak pada kategori kelas 3 dengan 63 responden (63%) dan untuk kategori aktual terbanyak pada kelas 3 dengan 95 responden (95%). Kesiediaan responden dalam membayar tunggakan iuran BPJS Kesehatan paling banyak berada pada kategori mau dengan 77 responden (77%). Pengetahuan mengenai jaminan kesehatan nasional responden paling banyak berada pada kategori baik dengan 57 responden (57%).

Tabel 5. Distribusi responden berdasarkan hubungan ATP 1, ATP 2 Non Makanan dan Non Esensial dengan WTP pada Peserta PBPU Pedagang Pasar Sentral Kabupaten Bone Tahun 2025

ATP	Kemauan Membayar				Total	
	Mau n	%	Tidak Mau n	%	n	%
ATP 1						
Tidak Mampu	14	14.0	47	47.0	61	61.0
Mampu	9	9.0	30	30.0	39	39.0
ATP 2 Non Makanan						
Tidak Mampu	17	17.0	56	56.0	73	73.0
Mampu	6	6.0	21	21.0	27	17.0
ATP 2 Non Esensial						
Tidak Mampu	16	16.0	50	50.0	66	66.0
Mampu	7	7.0	27	27.0	34	34.0

Sumber: Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa hubungan ATP 1 dan WTP responden terbanyak berada pada tidak mampu membayar iuran namun kemauan membayar tinggi yaitu sebanyak 47%. Hubungan ATP 2 non makanan dengan WTP responden terbanyak berada pada kategori tidak mampu namun mau membayar iuran sebanyak 56 responden (56%). Hubungan ATP 2 non esensial dan WTP terbanyak adalah tidak mampu namun mau membayar iuran dengan 50%,

Pembahasan

Kemampuan membayar peserta bukan penerima upah (PBPUP) pedagang pasar sentral kabupaten bone diukur melalui tingkat pendapatan keluarga selama satu bulan dan tingkat pengeluaran yang terdiri dari pengeluaran makanan, non makanan dan non esensial selama satu bulan. Pendapatan rumah tangga merupakan total dari pendapatan kepala rumah tangga dan pendapatan anggota-anggota rumah tangga lainnya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pendapatan responden mayoritas berada pada kategori > Rp.3.000.000. Jika berdasarkan UMK Kabupaten Bone 2024 lebih banyak berada pada tingkat pendapatan rendah dengan kategori <Rp.3.434.298 dibandingkan dengan responden yang memiliki tingkat pendapatan yang cukup.

Penghasilan yang didapatkan oleh pedagang dipengaruhi oleh jenis dan besar jualan yang dimiliki, pada penelitian ini responden memiliki jualan yang sedikit dan tidak besar. Selain itu, mayoritas responden paling banyak berumur 50-59 sebanyak 39 responden (39%), kategori tidak lagi masuk dalam usia produktif, pada usia ini seseorang akan mengalami penurunan produktifitas keterampilan dan fisik sehingga kurang mampu untuk bekerja menurut Rahmah (2019) salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah umur. Selain itu, kondisi pasar yang tidak strategis karena jauh dari pusat kota membuat pasar cenderung menjadi sepi pembeli kecuali mendekati hari perayaan tertentu sehingga penghasilan responden sebagai pedagang tidak menentu setiap harinya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariska (2020) yang menyatakan bahwa kondisi pasar menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan seseorang yang berkecimpung dalam kegiatan perdagangan.

Pengeluaran meliputi pengeluaran untuk makanan, non makanan, dan non esensial. Pengeluaran makanan merupakan keseluruhan pengeluaran responden dalam satu bulan mulai dari pengeluaran untuk padi-padian (beras), lauk pauk (ikan, telur, daging), minyak, susu buah, bumbu-bumbuan, dan konsumsi makanan lainnya yang dihitung dalam satuan rupiah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengeluaran makanan responden mayoritas <Rp.1.500.000. Besarnya pengeluaran makanan dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga, dalam penelitian ini mayoritas responden memiliki anggota keluarga 1-3 orang sebanyak (48%) sehingga kebutuhan makanan responden tidak terlalu besar. Hal ini sejalan dengan penelitian Yanti & Murtala (2019) dalam (Surya dan Saskara, 2024) yang menyatakan semakin banyak anggota keluarga, semakin besar pengeluaran untuk konsumsi karena banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, begitupun sebaliknya semakin sedikit anggota keluarga maka semakin rendah pengeluaran konsumsi makanan.

Pengeluaran non makanan merupakan keseluruhan dari pengeluaran responden selama satu bulan yang berupa pengeluaran biaya pendidikan, perumahan, keperluan rumah tangga, biaya aneka barang dan jasa, serta pengeluaran untuk pajak dan kontrakan yang dihitung dalam satuan rupiah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mayoritas responden memiliki pengeluaran non makanan <Rp.1.000.000. Berdasarkan pernyataan responden, pengeluaran non makanan yang paling besar adalah untuk listrik, air dan gas, karena pengeluaran ini mesti dikeluarkan setiap bulannya seperti halnya untuk

sabun dan biaya bahan bakar transportasi. Lain hal, untuk keperluan kebutuhan rumah tangga seperti alat dapur, alat makan, laptop dan telpon seluler yang hanya dibeli pada saat butuh saja, begitupun dengan keperluan pakaian yang mayoritas responden membeli hanya jika saat diperlukan seperti adanya perayaan. Selain itu, mayoritas responden membayar uang iuran per/hari untuk mereka berjualan di pasar sentral kabupaten bone jika ditotal Rp.60.000 perbulannya.

Pengeluaran non essensial merupakan pengeluaran selama satu bulan yang meliputi pengeluaran pesta, upacara, rokok, alkohol, jajanan, serta pengeluaran untuk liburan yang dihitung dalam satuan rupiah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengeluaran non essensial responden < Rp.500.000. Jumlah terbesar pada pengeluaran non essensial adalah pengeluaran rokok, jajan dan pesta. Hal ini disebabkan mayoritas responden berstatus sudah menikah sebanyak 85% dan rata-rata memiliki kepala rumah tangga yang merupakan perokok, selain itu rata-rata responden telah memiliki anak usia sekolah sehingga pengeluaran jajan dalam satu bulan cukup besar.

Dalam penelitian ini kemampuan membayar dihitung dengan dua pendekatan yaitu dengan menggunakan rumus ATP 1 yang diperoleh dari total pendapatan keluarga dengan total pengeluaran rumah tangga dibagi jumlah tanggungan untuk memperoleh hasil kemampuan membayar keluarga per orang. Pada pendekatan kedua menggunakan rumus ATP 2 diperoleh dari 5% dikali total pengeluaran non makanan dan non essensial.

Besaran ATP 1 kebanyakan responden tidak mampu membayar iuran JKN tiap bulannya sebanyak 61%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden memiliki pendapatan rendah sehingga menyebabkan ketidakmampuan membayar iuran JKN tiap bulannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewiyani menyatakan kemampuan membayaran asuransi kesehatan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan.¹⁵ Situasi ekonomi dan kebutuhan anggota keluarga berperan penting dalam menentukan kelancaran pembayaran. Kemampuan membayar dengan menggunakan rumus ATP 2, berdasarkan tabel 5.9 rata-rata kemampuan membayar pengeluaran non makanan responden adalah Rp.31.105 dan non esensial adalah Rp.17.275, jika dihitung dengan menggunakan rumus 5% dikali dengan pengeluaran non makanan setiap responden paling banyak berada pada tidak mampu dengan 73% dan untuk kategori mampu sebanyak (37%). Sedangkan untuk pengeluaran non essensial yang tidak mampu sebanyak (66%) dan untuk kategori mampu sebanyak (34%).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Noerjoedianto (2015) pada pekerja kerajinan tangan di desa Tutul Kabupaten Jember yang didapatkan bahwa rata-rata pengeluaran non essensial adalah Rp.56.000 dikarenakan responden banyak yang sudah menikah dan memiliki anak sehingga untuk pengeluaran essensial terbesarnya yaitu rokok dan jajan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Apriani, Zulkarnain, dan Idris (2021) menyatakan bahwa terdapat dua variabel yang berhubungan dengan kemauan membayar iuran yaitu variabel pendapatan dan pengeluaran non essensial.

Hasil menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan harapan pemerintah karena kemampuan membayar iuran BPJS Kesehatan lebih banyak pada kategori tidak mampu. Hal ini disebabkan pendapatan responden pedagang pasar sentral

yang rendah per bulannya disebabkan kondisi pasar yang tidak menentu menyebabkan mayoritas pendapatan responden rendah, sehingga pendapatan hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemampuan membayar yang dimiliki oleh masyarakat sangat mempengaruhi peran serta masyarakat dalam membayar iuran jaminan kesehatan. Oleh karena itu, kemampuan membayar perlu diperhatikan dalam penetapan tarif iuran BPJS Kesehatan.

Kemauan membayar adalah besar kemauan responden untuk membayar iuran BPJS Kesehatan yang dilihat dari segi kemauan membayar normatif dan aktual, dan pengetahuan tentang iuran JKN. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh WTP normatif rumah tangga responden dengan rata-rata Rp. 56.000,- per bulannya dengan WTP normatif paling banyak dalam kategori kelas 3 atau iuran Rp.35.000. Sedangkan untuk rata-rata WTP aktual adalah sebesar Rp. 38.750 dengan ATP aktual mayoritas berada dikategori kelas 3. %). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustina, Kusuma dan Siregar (2021) bahwa kemauan membayar (willingness to pay) menunjukkan WTP normatif sebesar Rp.37.604 dan WTP aktual sebesar Rp.37.604, responden paling banyak memilih kategori dikelas 3 dengan alasan masih cukup terjangkau.

Berdasarkan tabel 5.13 kemauan membayar tunggakan iuran responden menunjukkan sebanyak 77% mau membayar tunggakan iuran JKN, sedangkan responden yang tidak mau membayar tunggakan iuran sebanyak 23%. Hasil wawancara dengan responden diketahui kebanyakan alasan kemauan membayar tunggakan iuran dikarenakan apabila memiliki tunggakan kartu akan dinonaktifkan sementara akibatnya kartu BPJS Kesehatan tidak dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan apabila peserta tidak membayar tunggakan atau iuran. Selain itu, alasan responden tidak mau membayar tunggakan dikarenakan merasa sehat ataupun jarang sakit sehingga merasa tidak ada manfaat langsung dari membayar iuran setiap bulannya.

Minimnya pengetahuan merupakan salah satu faktor penghambat kepatuhan peserta JKN dalam membayar iuran. Dalam penelitian ini pengetahuan mengenai iuran JKN berada dikategori baik yakni sebanyak 57%. Kebanyakan responden mendapatkan informasi dari keluarga, teman, tetangga yang lebih dulu ikut serta BPJS Kesehatan, selain itu kebanyakan mengakses informasi melalui internet. Responden dengan tingkat pengetahuan yang baik akan memiliki informasi mengenai pentingnya jaminan kesehatan dan manfaat yang diperoleh sehingga mereka akan sadar dan taat dalam membayar iuran. Sedangkan responden dengan pengetahuan rendah cenderung tidak patuh dalam membayar iuran JKN karena minimnya informasi yang diperoleh. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tsuroyya dan Maharani (2023) menyatakan bahwa peserta PBPJ yang memiliki pengetahuan baik memiliki peluang tiga kali dalam kepatuhan membayar iuran JKN.

Kemampuan membayar dan kemauan membayar adalah dua faktor yang berperan dalam utilitas pelayanan medis yang selanjutnya akan mempengaruhi pemerataan. Hasil perhitungan ATP 1 dan WTP menunjukkan bahwa responden terbanyak berada pada kategori tidak mampu membayar iuran JKN namun memiliki kemauan membayar tinggi dengan sebanyak 47 responden (47%). Hasil penelitian ini sejalan dengan teori hubungan ATP dan WTP yang menyatakan bahwa jika kemampuan membayar lebih kecil daripada kemauan membayar berarti pengguna

mempunyai penghasilan yang relatif rendah namun utilitas terhadap jasa tersebut sangat tinggi.

Hubungan ATP non makanan dan WTP responden terbanyak berada kategori tidak mampu membayar iuran JKN namun kemauan membayar iuran tinggi sebanyak 73 responden (73%), sedangkan perhitungan ATP non essential dan WTP responden paling banyak sebesar (66%) atau 66 responden berada dikategori tidak mampu membayar iuran JKN namun memiliki kemauan membayar yang tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardy dan Yudha di pedagang pasar tradisional Kota Denpasar yang menyatakan bahwa kemampuan membayar pedagang untuk JKN masih cukup rendah. Fakta tersebut sejalan dengan teori Russel yang menyatakan bahwa ATP dipengaruhi oleh faktor pekerjaan dan pendapatan (Syamsinar, Batara dan Amelia, 2021). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Kelurahan Situ Kabupaten Sumedang oleh Mentari (2022) yang menyatakan bahwa banyaknya peserta yang memiliki kemampuan yang tinggi dalam membayar program JKN sementara kemauan peserta mandiri dalam membayar program JKN masih rendah.

Indonesia mendirikan BPJS Kesehatan yang selaras dengan tujuan Organisasi Kesehatan Dunia untuk mengembangkan jaminan kesehatan bagi semua penduduk.²⁰ Kemampuan membayar dan kemauan membayar merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan iuran BPJS Kesehatan. Program JKN diharapkan dapat membantu masyarakat dalam bidang kesehatan, namun apabila banyak masyarakat yang tidak mampu membayar iuran JKN akan berdampak pada peserta JKN dan BPJS Kesehatan. Ketidakmampuan peserta untuk membayar iuran dapat menyebabkan terjadinya tunggakan iuran sehingga dapat menyebabkan defisit keuangan BPJS Kesehatan. Sehingga perlu adanya pengoptimalan pendataan peserta yang berhak menerima bantuan iuran atau pemerintah perlu menambah alokasi anggaran untuk subsidi bagi peserta tidak mampu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa nilai ATP responden menggunakan rumus ATP 1 mayoritas berada pada kategori tidak mampu yaitu 69 responden (66%) dan untuk rumus ATP 2 mayoritas berada dikategori tidak mampu untuk non makanan yaitu 73 responden (73%) dan non essential berada pada kategori tidak mampu sebanyak 66 responden (66%). Nilai WTP normatif responden terbanyak berada dikategori kelas pelayanan 3 yaitu 63 responden (63%), dengan rata-rata setiap orang sebesar Rp.56.000 per bulan. WTP aktual terbanyak berada pada kategori kelas 3 JKN yakni sebanyak 95 responden (95%), dengan rata-rata setiap orang sebesar Rp.38.750 per bulan. Pengetahuan responden mengenai iuran JKN berada dikategori baik yakni 57 responden (57%). Mengingat mayoritas responden berada dalam kategori tidak mampu, maka pengeluaran non essential berupa rokok, jajan dan pesta dapat dikurangi atau dihentikan agar kemampuan membayar untuk iuran JKN semakin besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D., Kusuma, A. R., & Siregar, P. A. 2021. Analisis Kemampuan dan Kemauan Pasien PBPJ Membayar Iuran Jaminan Kesehatan Nasional. *Window of Health: Jurnal Kesehatan*, 238-247.
- Apriani, M., Zulkarnain, M., & Idris, H. 2021. Analisis Kemauan Membayar Iuran Dalam Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Petani Di Kabupaten Banyuwangi. *PREPOTIF Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5(2), 484-495.
- Ariska, D. A. 2020. *Analisis Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Mejayan Baru* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- BPJS Kesehatan. (2023). *Data Sampel BPJS Kesehatan*.
- BPJS Kesehatan. (2024). *Jumlah Kepesertaan BPJS Kesehatan Kabupaten Bone Tahun 2024*. Kabupaten Bone. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.
- BPJS Kesehatan. (2024). *Jumlah Peserta Bukan Penerima Upah (PBPJ) yang Menunggak Iuran BPJS Kesehatan Kabupaten Bone Tahun 2024*. Kabupaten Bone. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.
- Hidayanti, A. N., Batara, A. S., & Alwi, M. K. (2021). Determinan Ability To Pay dan Willingness To Pay Iuran Peserta Mandiri BPJS Kesehatan di Kecamatan Takabonerate (Studi Kasus di Kabupaten Kepulauan Selayar). *Promotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 11(1), 30–37. <https://doi.org/10.56338/pjkm.v11i1.1515>
- Hidayanti, B. A. (2020). Determinants of The Ability To Pay and The Willingness To Pay Subscription of BPJS Kesehatan on Independents in Takabonerate District (Case Study in Selayar Islands District). *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(02), 130–137.
- Istamayu, A. A. (2022). *Determinan kemauan membayar (willingness to pay) iuran jaminan kesehatan nasional pada peserta mandiri di Kota Jambi tahun 2021* (Doctoral dissertation, ilmu kesehatan masyarakat).
- Iqbal, M., Yeni, R., Kusumastuti, I., Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat, P., & Ilmu Kesehatan, F. (2023). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar (Willingness To Pay) Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pekerja Sektor Informal Di Kota Jakarta Timur Tahun 2023 Factors Influencing Willingness to Pay National Health Insurance Program Contribut*. 03(03), 87–96.
- Marzuki, D. S., Abadi, M. Y., Darmawansyah, D., Arifin, M. A., Rahmadani, S., & Al Fajrin, M. (2019). Analisis Kemampuan Membayar dan Kemauan Membayar Peserta PBPJ yang Menunggak Iuran JKN Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS. Dr. Soetomo*, 5(2), 102-113.

- Mentari, W. D. Hubungan Ability to Pay dan Willingness to Pay Dengan Kepatuhan Membayar Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional The Relationship between Ability to Pay and Willingness to Pay With the Compliance Program Paying the National Health Insurance Contribution.
- Sudarman, S., Batara, A. S., & Haeruddin, H. (2021). Faktor yang Berhubungan dengan Kemampuan dan Kemauan Membayar Iuran BPJS Peserta Mandiri di Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat. *Promotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 11(1), 45–57. <https://doi.org/10.56338/pjkm.v11i1.1517>
- Surya, P. S. S., & Saskara, I. A. N. 2024. Kontribusi Pendapatan Pedagang Buah Perempuan Terhadap Pengeluaran Rumah Tangga (Studi Kasus: Pedagang Buah Perempuan di Pasar Tradisional Kabupaten Bangli). *Journal of Education Transportation and Business*, 1(2), 910-919.
- Syamsinar, S., Batara, A. S., & Amelia, A. R. (2021). Gambaran Kemampuan Membayar Iuran BPJS Kesehatan pada Pedagang di Pasar Terong Kota Makassar. *Window of Public Health Journal*, 2(2), 359–369. <https://doi.org/10.33096/woph.v2i2.163>
- Taswin, S. K. M., Yusuff, A. A., SE, M., Amiruddin, E. E., Makhrajani Majid, S. K. M., Tuti Herawati, S. K. M., ... & Latupeirissa, L. W. (2022). *Buku Ajar Asuransi Kesehatan*. Feniks Muda Sejahtera.
- Tsuroyya, S. L., & Maharani, C. 2023. Systematic Literature Review: Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Peserta PBPJ dalam Membayar Iuran JKN. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 12(04), 193-204.
- Wahida, & Abdulahanaa. (2020). Analisis Disfungsi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Dan Kesejahteraan Pedagang Di Kompleks Pasar Sentral Palakka Kab. Bone. *Jurnal Al-tsarwah*, 3(1), 115–142.
- Wanti, D. I. (2024). Pengaruh Kepemilikan Asuransi Kesehatan Pada Kelompok Miskin Terhadap Utilisasi Pelayanan Kesehatan Di Indonesia: Sebuah Studi Retrospektif. *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, 8(2), 123. <https://doi.org/10.7454/eki.v8i2.7273>
- Zahara, F. P. A., & Rayasari, F. (2024). ANALISIS FAKTOR RESIKO KEJADIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR (HIPERTENSI, DIABETES MELITUS DAN OBESITAS) PADA PEDAGANG PASAR KAMAL. *Indonesian Journal of Nursing Sciences and Practice*, 6(2), 65–77.